



B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2022 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Renstra Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:



- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Akhir
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2021.

Mengingat arti strategi Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD Kabupaten Soppeng.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrembang Kabupaten.
4. Program dan kegiatan dalam dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), Indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

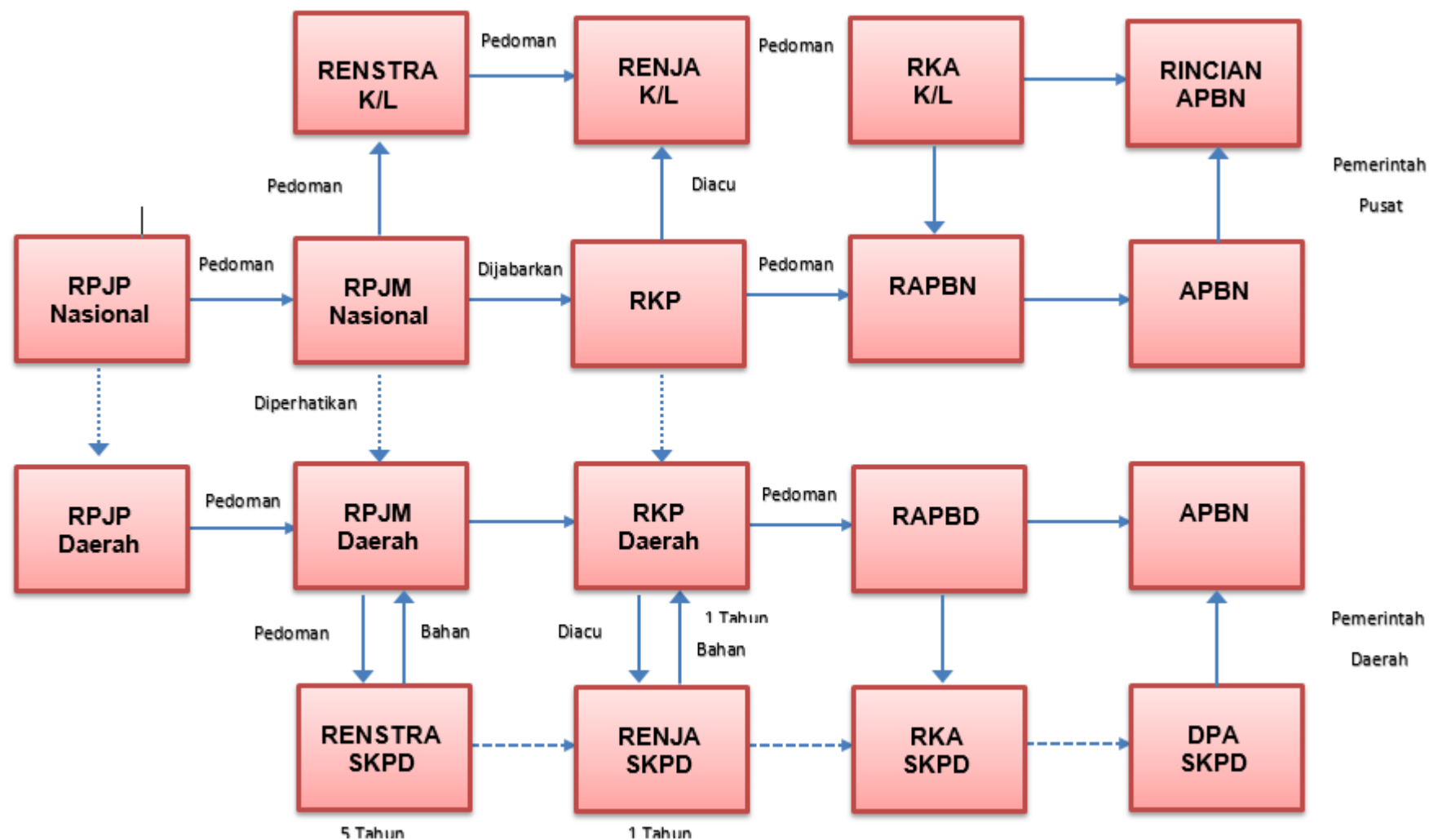
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan



penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Tindak lanjut Renja dengan proses penyusunan RAPBD yaitu dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan Rancangan Akhir RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.



Adapun keterkaitan antara RPJMD, RKPD, RENSTRA, DAN RKA sampai menjadi DPA dapat digambarkan sebagai berikut :





1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



- Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 ;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013–2025 ;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;



26. Peraturan Bupati Soppeng tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 -2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan 2021. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk :

1. Menjadi pedoman dan kerangka dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal.
3. Menciptakan kepastian kebijakan dan memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja Tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya.
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2022
2. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;



3. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
5. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan lebih berkualitas;
6. Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat, dan Tersedianya Piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai.
7. Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan menengah daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja pemerintah daerah. Maka sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

B A B I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yaitu :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra



SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

B A B II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Periode 2016 - 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun lalu (2020), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap Rancangan Akhir RKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berisikan uraian Mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022. Perkembangan tingkat kinerja pelayanan administrasi keuangan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.



2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kerja yang di capai oleh SKPD.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

B A B III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program / Kegiatan

4.2 Indikator Kinerja

4.3 Kelompok Sasaran

4.4 Lokasi Kegiatan

4.5 Kebutuhan Dana Indikatif

4.6 Sumber Dana

B A B V. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan , kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



B A B II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Periode 2016-2021

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk 1)mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2)mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 3)mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 memuat 5 (lima) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.537.789.469. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan, kegiatan yang dianggarkan hingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Soppeng Tahun 2020, terdiri atas 5 (lima) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan senilai Rp. 12.565.789.469 dengan realisasi sebesar Rp.11.977.306.942,-.

Dalam menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi “Sangat Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 91-100%, “Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 75-90%, “Sedang” yaitu capaian berkisar antara 65-75%, “Rendah” yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan “Sangat Rendah” yaitu capaian di bawah 50%. Capaian Kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 mencapai kinerja keuangan sebesar 95.32% (Predikat **Sangat Tinggi**) dan Kinerja Fisik sebesar 96,64% (Predikat **Sangat Tinggi**).

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) dan Tahun 2020. Dalam



mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan di capai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah :

1. Meningkatkan kualitas manajemen pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan prima kepada stakeholder serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah dan partisipasi pihak ketiga;
3. Meningkatkan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan integritas;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan penerimaan daerah.

Pada Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya adapun realisasi Tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan Gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.22.267.419.938,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.266.216.268,00,- atau 95,75%

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 melaksanakan 5 (Lima) program pembangunan yang dijabarkan melalui 51 kegiatan. Alokasi dana yang dianggarkan melalui belanja langsung sebesar Rp.5.340.005.400,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.309.883.793,00,- atau 99,44% adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng meliputi :

1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Terlaksananya Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan dengan 20 (dua puluh) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.8.780.567.270,- dapat terealisasi sebesar Rp.8.636.197.905,- atau 94,89 % dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :



- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasil yang dicapai adalah tersedianya prasarana utama penunjang kerja dengan jumlah output sebanyak 36 Kali dan raelisasi fisik 100%. Jumlah anggaran Rp. 5.340.005.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.309.883.493,- atau 99,44 %
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, hasil yang dicapai adalah terciptanya peningkatan pelaksanaan tugas-tugas operasional dengan jumlah otuput 340 Unit. Jumlah anggaran Rp. 38.598.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.117.360,- atau 78,03 %.
- 3) Penyediaan Layanan kebersihan kantor, hasil yang dicapai adalah terciptanya peningkatan kebersihan kantor dengan jumlah output 3 Orang petugas layanan dan 10 Jenis peralatan kebersihan. Jumlah anggaran Rp.423.555.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.415.750.000,- atau 98,16 %.
- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, hasil yang dicapai adalah terciptanya penerangan bangunan kantor dengan jumlah output 20 Jenis komponen peralatan listrik. Jumlah anggaran Rp. 33.069.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.059.100,- atau 96,95%.
- 5) Penyediaan peralatan rumah tangga, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan jumlah output 2 Jenis. Jumlah anggaran Rp.2.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.860.000,- atau 93,00%.
- 6) Penyediaan bahan logistik kantor, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya bahan logistik kantor dengan jumlah output 21 Kali pengisian tabung gas. Jumlah anggaran Rp. 1.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000,- atau 96,97 %.
- 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan percepatan realisasi pemungutan PAD dengan jumlah output 146 Kali. Jumlah anggaran Rp.23.595.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.421.130.400,- atau 90,76%.
- 8) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, hasil yang dicapai adalah terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan peningkatan intensitas pelaksanaan tugas dengan jumlah output 3 Paket. Jumlah anggaran Rp.630.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.609.727.850,- atau 96,68 %.



- 9) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, hasil yang dicapai tersedianya kendaraan dinas dengan jumlah output 2 Unit. Jumlah Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 83,33%.
- 10) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, hasil yang dicapai tersedianya sarana dan prasarana kantor dengan jumlah output 3 Jenis. Jumlah anggaran Rp.86.045.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.85.413.500,- atau 99,27 %.
- 11) Pengadaan peralatan gedung kantor, hasil yang dicapai tersedianya sarana dan prasarana kantor dengan jumlah output 2 Jenis. Jumlah anggaran Rp.295.859.320,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.295.804.320,- atau 99,98%.
- 12) Pengadaan Meubeleur, hasil yang dicapai tersedianya sarana dan prasarana kantor dengan jumlah output 1 Jenis. Jumlah anggaran Rp.35.970.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.970.000,-atau 100%.
- 13) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, hasil yang dicapai terwujudnya bangunan yang layak fungsi dengan jumlah output 320 Meter Persegi. Jumlah anggaran Rp.104.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.455.750,- atau 95,63 %.
- 14) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional, hasil yang dicapai tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi dengan jumlah output 75 Unit. Jumlah anggaran Rp. 147.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.139.346.932,- atau 94,79 %.
- 15) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, hasil yang dicapai tersedianya peralatan gedung kantor yang layak fungsi dengan jumlah output 5 Jenis. Jumlah anggaran Rp.15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.300.000,- atau 68,67%.
- 16) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, hasil yang dicapai terwujudnya sarana dan prasarana yang layak fungsi dengan jumlah output 225 Meter Persegi. Jumlah anggaran Rp.369.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.366.338.000,- atau 99,24%.
- 17) Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi, hasil yang dicapai tersedianya aplikasi yang layak fungsi dengan jumlah output 4 Aplikasi. Jumlah anggaran Rp.682.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.680.942.500,- atau 99,84%.
- 18) Pengadaan Mesin/Kartu absensi, hasil yang dicapai terdedianya Mesin Absensi yang diadakan dengan jumlah output 6 Unit. Jumlah Anggaran



Rp.34.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- atau 95,65%.

- 19) Pembinaan Kepegawaian, hasil yang dicapai yaitu tersedianya 7 dokumen kepegawaian (SKP,SOP,ANJAB,EVAJAB,ABK,KGB,Rekap Absensi). Jumlah Anggaran Rp.12.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.558.700,- atau 99,87%.
- 20) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang–undangan, hasil yang dicapai meningkatnya pengetahuan/keterampilan PNS dengan jumlah output 1 orang. Jumlah anggaran Rp4.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.940.000,- atau 100 %.

21) Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggaran Rp.38.661.875,- dapat terealisasi Rp.38.318.025,- atau 99,11% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 6 output terdiri atas RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN. Jumlah anggaran Rp. 19.090.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.031.725,- atau 99.69%
- 2) Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan kinerja dengan jumlah output 5 laporan 2020 terdiri atas LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR. Jumlah Anggaran Rp. 6.775.000,-dengan realisasi Rp. 6.744.150,- atau 99,54%
- 3) Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan dengan 7 output yang terdiri atas Laporan Keuangan Semester I dan II, Laporan Triwulan I/II/III/IV, laporan Tahunan. Jumlah anggaran Rp.7.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.464.750,- atau 97,58%.
- 4) Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi, Hasil yang dicapai adalah tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi dengan jumlah output 4 laporan tahun 2020 yang terdiri atas Laporan Evaluasi RENJA Triwulan I, II, III dan IV.



2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 18 (Delapan belas) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.2.027.791.700,- dapat terealisasi Rp.1.880.579.750,- atau 92,74% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan standar satuan harga, hasil yang dicapai adalah tersedianya buku standarisasi harga satuan barang dan jasa dengan jumlah output 2 Buku. Jumlah anggaran Rp. 91.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.63.900.000,- atau 70,10%.
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, hasil yang dicapai tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah output 1 Rancangan Perda. Jumlah anggaran Rp.344.085.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.330.776.850,- atau 96,13%.
- 3) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD, hasil yang dicapai tersedianya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah output 1 Rancangan Perbup. Jumlah anggaran Rp.59.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.57.936.900,- atau 96,97%.
- 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, hasil yang dicapai tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah output 1 Rancangan Perda. Jumlah anggaran Rp.820.930.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.806.16.375,- atau 98,20 %.
- 5) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, hasil yang dicapai tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah output 1 Rancangan Perbup. Jumlah anggaran Rp. 67.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.64.673.275,- atau 95,67 %.
- 6) Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, hasil yang dicapai tersedianya Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah output 1 Rancangan Perda. Jumlah anggaran Rp.67.826.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.67.767.400,- atau 99,91 %.
- 7) Penyusunan rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, hasil yang dicapai tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah



- anggaran 1 Rancangan Perbup. Jumlah anggaran Rp.40.740.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.40.737.075,- atau 99,99 %.
- 8) Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait, hasil yang dicapai tersedianya data sinkronisasi & rekonsiliasi pengelolaan dana transfer, pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer dari Pusat, Provinsi dan lainnya, tersedianya administrasi realisasi penyerapan dan evaluasi pertanggungjawaban anggaran transfer Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, koordinasi dan rekonsiliasi dengan SKPD penerima dana transfer, dengan jumlah output 9 SKPD. Jumlah anggaran Rp.11.087.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.057.500,- atau 99,73 %.
- 9) Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, hasil yang dicapai terselesaikannya kasus kerugian Negara/Daerah dengan jumlah output 2 Kali. Jumlah anggaran Rp. 166.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.93.450.000,- atau 56,04 %.
- 10) Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil yang dicapai tersedianya peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan jumlah output 4 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Diantaranya Peraturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran Rp.95.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.975.000,- atau 100%.
- 11) Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, hasil yang dicapai terciptanya pelayanan keuangan yang efektif dan efisien melalui proses penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian atas pengesahan SPJ, dll. Dengan jumlah output 100%. Jumlah anggaran Rp.67.607.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.542.500,- atau 99,94 %.
- 12) Sosialisasi APBD pokok dan perubahan, hasil yang dicapai terciptanya pemahaman masyarakat tentang APBD Pokok dan Perubahan dengan jumlah output 200 Kali. Jumlah anggaran Rp.22.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- atau 66,67 %.
- 13) Penyusunan Standar Biaya Umum, hasil yang dicapai tersedianya Standar Biaya Umum dengan jumlah output 1 Dokumen. Jumlah anggaran Rp. 10.850.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.985.875,- atau 64,39 %.
- 14) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan daerah, hasil yang dicapai tersedianya laporan keuangan yang akuntabel dengan jumlah output 2



Laporan. Jumlah anggaran Rp.2.825.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.450.000,- atau 86,73 %.

- 15) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten, hasil yang dicapai tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah dengan jumlah output 1 Jenis Laporan. Jumlah anggaran Rp.36.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.313.000,- atau 97,08 %.
- 16) Penyusunan laporan keuangan semesteran kabupaten, hasil yang dicapai tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis kabupaten dengan jumlah output 2 laporan. Jumlah anggaran Rp.61.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.510.000,- atau 98,83%.
- 17) Pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD, hasil yang dicapai terkelolanya gaji PNSD secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat orang dengan jumlah output 100 %. Jumlah anggaran Rp.24.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.940.000,- atau 100 %.
- 18) Peningkatan manajemen pengelolaan kas daerah, hasil yang dicapai terkelolanya kas daerah secara proporsional dan terkendali dengan jumlah output 5 Dokumen. Jumlah anggaran Rp.35.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.370.000 ,- atau 99,42 %.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 (lima) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.766.171.025,- dapat terealisasi Rp.529.895.062,- atau 69,16% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan barang milik daerah, hasil yang dicapai tersedianya laporan milik daerah dengan jumlah output 3 Dokumen. Jumlah anggaran Rp. 110.278.225,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.91.898.812,- atau 83,33%.
- 2) Penjualan dan penghapusan barang milik daerah, hasil yang dicapai tersedianya data laporan BMD yang akan dijual dan dihapuskan dengan jumlah output 4 Dokumen. Jumlah anggaran Rp.77.364.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.52.335.150,- atau 67,65 %.
- 3) Penilaian aset daerah, hasil yang dicapai tersedianya data nilai aset daerah dengan jumlah output 1 Dokumen. Jumlah anggaran Rp.82.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.586.550,- atau 97,21%.
- 4) Pengamanan aset–aset pemerintah daerah, hasil yang dicapai terciptanya keamanan aset–aset pemerintah daerah dengan jumlah output 60 Aset



Pemda dan 2 Titik Penjagaan. Jumlah anggaran Rp.495.205.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.304.650.750,- atau 61,52 %.

- 5) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, hasil yang dicapai terciptanya pengelolaan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dengan jumlah output 34 OPD. Jumlah anggaran Rp.423.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.423.800,- atau 100 %.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan 4 (empat) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.952.597.599,- dapat terealisasi Rp.892.316.200,- atau 93,67% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan barang cetakan/benda berharga, hasil yang dicapai tersedianya barang cetakan/benda berharga dengan jumlah output 256 Jenis. Jumlah anggaran Rp.313.102.599,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.294.554.000,- atau 94,08%.
- 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, hasil yang dicapai meningkatnya pendapatan asli daerah dengan jumlah output 100%. Jumlah Anggaran Rp.459.270.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.425.990.900,- atau 92,75%.
- 3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah, hasil yang dicapai meningkatnya pendapatan asli daerah dengan jumlah output 100%. Jumlah Anggaran Rp.62.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.55.950.000,- atau 89,31%.
- 4) Pembentukan dan pemuktahiran basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah, hasil yang dicapai tersedianya data bangunan objek pajak dan retribusi daerah yang valid dengan jumlah output 3 Laporan. Jumlah anggaran Rp.117.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.115.821.300,- atau 98,51%.

Dari uraian Program kegiatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk review evaluasi Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2020, nampak kinerja sebagai berikut :



2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebelumnya.

Walaupun beberapa kegiatan dalam program tersebut yang tidak mencapai target, namun tidak mempengaruhi capaian kinerja Program bersangkutan. *Kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran ada 2 Kegiatan yaitu:*

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Rencana target pengesahan STNK untuk 340 unit dan realisasi keluaran/output hanya sebanyak 328 unit. Hal ini dikarenakan beberapa kendaraan yang akan dilakukan pengesahan STNK belum dilakukan cek fisik.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
Untuk tingkat Kabupaten secara keseluruhan capaian target pajak daerah sudah melebihi target. Namun ada beberapa UPTD Kecamatan yang belum mencapai target, diantaranya UPTD Kec.Lalabata, UPTD Kec.Lilirilau, UPTD Kec.Ganra dan Kec. Citta.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Seluruh Program pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebelumnya. Adapun kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebanyak 47 kegiatan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain: Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya, dan Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil analisa pengukuran menunjukan bahwa rata-rata setiap program dan kegiatan telah mencapai target yang ditunjukan pada tiap–tiap program dan kegiatan rata-rata telah direalisasikan mencapai hampir 100% secara keseluruhan, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dengan alasan dan pertimbangan tertentu sehingga tidak dilaksanakan. Hal ini nampak pada Laporan Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah direncanakan:

1. Prasarana dasar dari segi kualitas dan kuantitas belum memadai
2. Terbatasnya sumber daya dana, Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah dan kurang serta penguasaan teknologi yang masih rendah.
3. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masih kurangnya pegawai pelaksana yang mampu dalam bidang urusannya serta masih kurangnya pejabat yang menangani bidang dan urusan pemerintahan yang begitu banyak dan kompleksibilitas.
4. Keterbatasan waktu pelaksanaan pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan dana anggaran APBD Daerah
5. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang tidak bisa direalisasikan/Kembali ke kas daerah

Pencapaian program renstra perangkat daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dari secara fisik tercapai 96,64 %, dan realisasi keuangan hanya 95,32% hal ini disebabkan adanya efesiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang sifatnya rutin yaitu program peningkatan pelayanan perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Tidak tercapainya realisasi keuangan 100 % pada beberapa program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, secara keseluruhan berimplikasi terhadap beberapa hal yakni :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya



- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan
- b. Perlu adanya koordinasi kepada stakeholder terkait masalah percepatan pelaksanaan kegiatan serta percepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah



Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Non Urusan									
	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu		100	100%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kali)	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		60 kali	36 Kali	36 Kali	100			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/operasional		308 unit	340 Unit	328 Unit	96,47			
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan		28 orang dan 14 Jenis	3 Orang dan 10 Jenis	3 Orang dan 10 Jenis	100			
		Jumlah jenis peralatan kebersihan					100			



			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangun	Jumlah jenis alat listrik / penerangan bangunan	20 jenis	20 Jenis	20 Jenis	100			
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	7 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100			
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	1 kali	21 Kali	21 Kali	100			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.116 kali	300 Kali	499 Kali	166,33			
			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	17 paket	3 Paket	3 Paket	100			
			Pengelolaan Halaman Website Dias/Badan/Kantor	Jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate	0		10 informasi/Berita				
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	0	2 Jenis	2 Jenis	100			
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	10 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100			
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	7 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100			
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur yang diadakan	8 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	0	320 m2	320 m2	100			



			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		90	75 Unit	75 Unit	100			
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara		3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100			
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung yang direhabilitasi (bangunan)		1 Unit	225 m2	225 m2	100			
			Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, tempat parkir	Luas Halaman yang di rehabilitasi		350 m2	-	-	-			
			Pemeliharaan Rutin berkala aplikasi	Jumlah jenis aplikasi yang dipelihara		8 aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100			
			Pengadaa mesin/kartu absensi	Jumlah Absensi yang diadakan		0	6 Unit	6 Unit	100			
			Pembinaan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian		0	7 dokumen	7 dokumen	100			
			Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Jumlah peserta sosialisasi		330 orang	-	-	0			
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan		170 orang	1 Orang	1 Orang	100			



			Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		0	100%	100%	100%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		0	6 dokumen	6 dokumen	100			
			Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja		0	5 dokumen	5 dokumen	100			
			Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan		0	7 dokumen	7 dokumen	100			
			Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi		0	4 dokumen	4 dokumen	100			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu								
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun		4 Laporan						
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan		2 Laporan						
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan		1 Laporan						



				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%			
				Penyusunan Standar satuan Harga	Jumlah buku standarisasi satuan harga barang dan jasa		2 Buku	2 Buku	2 Buku	100			
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan Perda tentang APBD		1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	100			
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan perbup tentang penjabaran APBD		1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	100			
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah rancangan perda tentang perubahan APBD		1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	100			
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah rancangan perbup tentang penjabaran perubahan APBD		1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	100			
				Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	100			
				Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	100			



			Sinkronisasi dan Rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait	Jumlah laporan sinkronisasi dan rekonsiliasi		1 SKPD	9 SKPD	9 SKPD	100			
			Peningkatan manajemen tuntunan ganti kerugian keuangan daerah	Jumlah pelaksanaan sidang majelis		1 Kali	2 Kali	2 Kali	100			
			Penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan	Jumlah rancangan peraturan perundang – undangan		4 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	100			
			Peningkatan pengelolaan administrasi	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu		100%	100%	100%	100%			
			Sosialisasi APBD pokok dan perubahan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi APBD		200 Orang	200 Orang	200 Orang	100			
			Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu		40 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100			
			Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyelesaikan laporannya tepat waktu		49	-	-	-			
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah		7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100			
			Penyusunan laporan keuangan semesteran kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran Kabupaten		2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100			
			Pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah		100%	100%	100%	100%			
			Peningkatan manajemen pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen kas		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100			



				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah SKPD dengan pencatatan aset yang benar		75%	100%	100%	100%			
				Penyusunan laporan barang milik Daerah	Jumlah laporang barang milik daerah		9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
				Penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah laporan RKBUD dan RPBMD		2 Dokumen	-	-	-			
				Penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
				Penilaian Aset Daerah	Jumlah dokumen penilaian aset daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
				Pengamanan aset – aset pemerintah daerah	Jumlah aset pemda yang diamankan		10 Aset Pemda & 3 Titik Penjagaan	60 Aset Pemda & 2 Titik Penjagaan	60 Aset Pemda & 2 Titik Penjagaan	100			
				Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang di bina dan diawasi dalam pengelolaan BMD		40 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	100			
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD		100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan barang cetakan/benda berharga	Jumlah barang/cetakan benda berharga		256 Jenis	120 Jenis	120 Jenis	100			
				Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Persentase pencapaian target pajak daerah		100%	100%	100%	100%			
				Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah	Persentase pencapaian target retribusi daerah		74%	100%	155%	155,08%			
				Pembentukan dan pemutakhiran basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah laporan pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi		1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020, dapat di lihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa aspek:

1. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang di fokuskan pada penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun yaitu Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil yang difokuskan pada penyerapan dana perimbangan dibandingkan dengan dana perimbangan yang direncanakan.
3. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD yang di fokuskan pada besaran PAD.
4. Keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah keuangan yaitu melalui ketepatan waktu penetapan Perda APBD, tersedianya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tersedianya anggaran belanja untuk pelayanan dasar.
5. Efektivitas perencanaan, penyusunan pelaksanaan tata usaha pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang difokuskan pada kewajaran

Laporan Keuangan melalui opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Rasio Silpa terhadap total pendapatan.

6. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, Peningkatan PAD dari Tahun sebelumnya.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2020.

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tersaji dalam Tabel 2.1.

Beberapa aspek tersebut di atas dirinci dalam table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2020, sebagai berikut :



Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kerja Pelayanan SKPD

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3		4	5	6	6	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Tujuan)		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK
2	Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja anggaran OPD Laporan Keuangan OPD, dan Pelaporan Aset OPD		Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Surat Edaran Bupati Soppeng tentang Penyusunan RKA dan Laporan Keuangan Daerah
3	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tujuan)		Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	100	100	100	100	100	100	100	100	Hasil Penilaian Aparatur yang berkinerja sangat baik
4	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah		Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Rata-Rata Capaian IKU Perangkat Daerah

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

2.3.1 *tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah*

Dalam menjalankan kapasitas peran dan fungsinya yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan strategis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng perlu mengidentifikasi faktor internal yang menyangkut kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menyangkut peluang dan ancaman, sehingga upaya mengatasinya dibutuhkan adanya koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan berbagai komponen, instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan, kelurahan/desa.

2.3.2 *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah*

1. Prasarana dasar dari segi kualitas dan kuantitas belum memadai
2. Terbatasnya sumber daya dana, Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah dan kurang serta penguasaan teknologi yang masih rendah.
3. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masih kurangnya pegawai pelaksana yang mampu dalam bidang urusannya serta masih kurangnya pejabat yang menangani bidang dan urusan pemerintahan yang begitu banyak dan kompleksibilitas.
4. Keterbatasan waktu pelaksanaan pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan dana anggaran APBD Daerah

2.3.3 *Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional*

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2020. Dalam RPJMD tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mendukung pencapaian misi “Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi” dengan Tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal”.

Salah satu indikator sudah tercapai yaitu opini WTP atas tercapainya Laporan Keuangan Kabupaten Soppeng 6 kali berturut-turut dari Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Indikator ini harus dapat dipertahankan hingga akhir periode Renstra.

Hal ini berdampak untuk pencapaian Tujuan Nasional yakni **Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan**

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Tantangan untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 adalah mempertahankan capaian opini WTP atas pencapaian laporan keuangan serta penyelesaian Penyusunan Anggaran, Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang tepat waktu.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Berbagai Kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor internal :

a. Kekuatan (Strength) :

- Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng
- Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran
- Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Tersedianya dukungan tenaga pejabat struktural serta pejabat fungsional umum yang dapat diberdayakan untuk merespon perubahan kondisi dan meningkatkan kompetensi dan kinerja SKPD.



- Tersedianya dukungan anggaran yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dan fungsi SKPD

b. Kelemahan (weaknes) :

- Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas pejabat fungsional umum dan pejabat struktural yang ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah .

2. Faktor Eksternal.

a. Peluang (Opportunity) :

- Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng. Adanya tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan Pelayanan.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Diberlakukannya sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-planning, e-budgetting dan e-monev*) di SKPD Kabupaten Soppeng.
- Adanya diklat, seminar, bintek workshop (secara daring) dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan/swasta.
- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

b. Ancaman (Treath) :

- Kesadaran Wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah dalam melunasi tagihan pajak dan retribusinya.

- Pemberlakuan undang-undang yang membatasi jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang berdampak pada penurunan realisasi PAD.
- Pemotongan dana transfer dari pusat
- Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
- Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
- Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan yang direncanakan

Dari uraian faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan di rumuskan isu–isu strategis yang di kelompokkan dengan urusan sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan aset/barang daerah (terutama inventarisasi dan pengadministrasian) masih di temukan kelemahan sehingga perlu di lakukan berbagai upaya mendorong optimalisasinya, baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah maupun di SKPD lainnya.
Hal tersebut menjadi masalah krusial karena pengelolaan aset/ barang daerah telah menjadi bagian audit substantif BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu dukungan kebijakan melalui regulasi daerah dan komitmen bersama dari semua SKPD dilingkup Pemda Kabupaten Soppeng.
2. Pemanfaatan kekayaan daerah belum optimal untuk meningkatkan PAD Kabupaten Soppeng dan regulasi berupa peraturan Daerah yang ada sebagai dasar hukum pemanfaatan kekayaan daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut.
3. Dalam pengelolaan Pendapatan daerah masih di temukan Wajib Pajak yang masih rendah kesadarannya untuk membayar pajak dan belum optimalnya pemungutan atas potensi pajak yang ada. Mendasari hal tersebut , maka perlu dilakukan upaya secara terus menerus peningkatan kesadaran wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan dukungan regulasi daerah sebagai kensekuensi



dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah.

4. Data Piutang PBB yang diserahkan dari pusat ke daerah melalui KPP Pratama Watampone belum valid.
5. Penerimaan PAD Kabupaten Soppeng belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD. Oleh karena itu perlu untuk menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi dengan tetap memperhatikan kondisi yang tidak terlalu membebani masyarakat.
6. Belum terintegrasikannya aplikasi SIAKD, SISMIOP, PBB, Aplikasi pendapatan daerah dan Aplikasi barang daerah ke dalam satu system. Oleh karena itu perlu dilakukan pengoptimalan semua fungsi yang ada pada aplikasi baik dengan cara perpindahan/ migrasi pemanfaatan system ataupun kostomisasi aplikasi untuk mendorong tercapainya kesatuan aplikasi system tersebut guna memperoleh hasil integritas sistem yang memadai.
7. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
8. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
9. Pelayanan prima;
10. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesuai tuntutan kebutuhan;
11. Pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset;
12. Pengintegrasian Standar Satuan Harga dan Satuan Harga Online.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap Tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, Provinsi, maupun Nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Kedepan diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah



Daerah (RKPD) Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten soppeng.

Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016–2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan Rancangan Akhir tidak terdapat perbedaan, dimana program–program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.



Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN				149,264,438,671	KEUANGAN				149,264,438,671	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25,794,746,330	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25,794,746,330	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50,130,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50,130,000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	7,795,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	7,795,000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA yang disusun	100 %	14,705,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA yang disusun	100 %	14,705,000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	100 %	15,830,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	100 %	15,830,000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	100 %	11,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	100 %	11,800,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17,144,422,145	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17,144,422,145	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	100 %	17,012,659,145	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	100 %	17,012,659,145	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SPM yang diverifikasi	100 %	118,340,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SPM yang diverifikasi	100 %	118,340,000	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	100 %	13,423,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	100 %	13,423,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					41,050,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					41,050,000
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen kepegawaian	100 %	41,050,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen kepegawaian	100 %	41,050,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					933,341,170	Administrasi Umum Perangkat Daerah					933,341,170
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	15,523,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	15,523,500	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah paket bahan logistik kanto	100 %	143,565,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah paket bahan logistik kantor	100 %	143,565,000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	312,532,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	312,532,500	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	100 %	168,764,970	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	100 %	168,764,970	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah tamu yg difasilitasi	100 %	20,425,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah tamu yg difasilitasi	100 %	20,425,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	272,530,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	272,530,200	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				357,530,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				357,530,000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	100 %	337,530,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	100 %	337,530,000	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pengadaan Sumur Bor	100 %	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pengadaan Sumur Bor	100 %	20,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,070,053,965	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,070,053,965	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Pengiriman	100 %	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Pengiriman	100 %	10,000,000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	100 %	6,540,253,965	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	100 %	6,540,253,965	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	100 %	519,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	100 %	519,800,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				198,219,050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				198,219,050	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK	100 %	157,444,050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK	100 %	157,444,050	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 %	19,050,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 %	19,050,000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah unit gedung yang di rehabilitasi	100 %	21,725,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah unit gedung yang di rehabilitasi	100 %	21,725,000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					121,722,364,598	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					121,722,364,598
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1,177,605,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1,177,605,000
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA- PPAS Pokok Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan KUA- PPAS Pokok	100 %	24,050,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA- PPAS Pokok Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan KUA-PPAS Pokok	100 %	24,050,000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA- PPAS Perubahan Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS Perubahan	100 %	38,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen KUA- PPAS Perubahan Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program Perubahan RKPD dengan KUA-PPAS Perubahan	100 %	38,900,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA- SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA- SKPD (Juknis)	100 %	36,225,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA- SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA- SKPD (Juknis)	100 %	36,225,000	
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA- P SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA- Perubahan SKPD (Juknis)	100 %	43,225,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen RKA- P SKPD yang terverifikasi sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA- Perubahan SKPD (Juknis)	100 %	43,225,000	
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disah-kan	100 %	5,775,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disah-kan	100 %	5,775,000	
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA- Perubahan SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disah-kan	100 %	5,950,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang di asistensi Persentase dokumen DPA- Perubahan SKPD yang terverifikasi dan tervalidasi untuk disah-kan	100 %	5,950,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Persentase Program Ranperda- Ranperbub APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD dan Perbup APBD	100 %	524,525,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Persentase Program Ranperda- Ranperbub APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD dan Perbup APBD	100 %	524,525,000	
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah pesPersentase Program Ranperda- Ranperbub APBD-P yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD-P dan Perbup APBD-P	100 %	480,050,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah pesPersentase Program Ranperda- Ranperbub APBD-P yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda APBD-P dan Perbup APBD-P	100 %	480,050,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Standar Biaya Umum Persentase keabsahan biaya dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU)	100 %	18,905,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Standar Biaya Umum Persentase keabsahan biaya dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU)	100 %	18,905,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					128,654,500	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					128,654,500
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Kas Daerah Persentase ketersediaan dana transaksi harian daerah	100 %	16,783,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Kas Daerah Persentase ketersediaan dana transaksi harian daerah	100 %	16,783,000	
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD Persentase ketersediaan dan kecukupan anggaran kas daerah terhadap rencana penarikan anggaran setiap periode	100 %	16,860,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD Persentase ketersediaan dan kecukupan anggaran kas daerah terhadap rencana penarikan anggaran setiap periode	100 %	16,860,000	
05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	100 %	14,200,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	100 %	14,200,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah LaporanPersentase kelancaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	23,290,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah LaporanPersentase kelancaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	23,290,000	
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	100 %	25,355,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	100 %	25,355,000	
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase pengujian dan pengkajian kebenaran kelengkapan dokumen SPM SKPD Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	100 %	32,166,500	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase pengujian dan pengkajian kebenaran kelengkapan dokumen SPM SKPD Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	100 %	32,166,500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				356,130,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				356,130,000	
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel Persentase penyajian laporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai PSAP dan akuntabel	100 %	34,750,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel Persentase penyajian laporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai PSAP dan akuntabel	100 %	34,750,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten Persentase penyajian laporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban yang jujur dan dapat diverifikasi	100 %	45,950,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten Persentase penyajian laporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban yang jujur dan dapat diverifikasi	100 %	45,950,000	
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disusun Persentase implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	30,765,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disusun Persentase implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	30,765,000	
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT Ratio pemenuhan entitas akuntansi keuangan	100 %	85,900,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT Ratio pemenuhan entitas akuntansi keuangan	100 %	85,900,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD	100 %	64,450,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang disetujui dan disahkan untuk menjadi Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD	100 %	64,450,000	
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Persentase Kasus Kerugian daerah yang dapat terselesaikan dengan baik	100 %	55,070,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis Persentase Kasus Kerugian daerah yang dapat terselesaikan dengan baik	100 %	55,070,000	
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang telah sesuai Juknis dan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tersusunya sisdur akuntansi dan lap keuangan	100 %	39,245,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang telah sesuai Juknis dan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tersusunya sisdur akuntansi dan lap keuangan	100 %	39,245,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				120,059,975,098	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				120,059,975,098	
08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase pengalokasian TKDD dan DD yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	112,463,982,700	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase pengalokasian TKDD dan DD yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	112,463,982,700	
09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak Persentase pengalokasian dan pemenuhan kebutuhan dana tanggap darurat dan mendesak	100 %	5,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak Persentase pengalokasian dan pemenuhan kebutuhan dana tanggap darurat dan mendesak	100 %	5,000,000,000	
10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	2,595,992,398	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Persentase pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100 %	2,595,992,398	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK				706,380,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK				706,380,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DAERAH					DAERAH					
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				706,380,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah				706,380,000	
01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan JasaPersentase keabsahan data harga dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH)	100 %	107,000,000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan JasaPersentase keabsahan data harga dalam penyusunan RKA-SKPD, yang berdasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH)	100 %	107,000,000	
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Ratio kevalidan data BMD terhadap kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah	100 %	36,425,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Ratio kevalidan data BMD terhadap kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah	100 %	36,425,000	
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Pemda Jumlah Titik Penjagaan Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	352,195,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Pemda Jumlah Titik Penjagaan Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	352,195,000	
08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah Ratio kewajaran Nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemda	100 %	36,140,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah Ratio kewajaran Nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemda	100 %	36,140,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Persentase keterpenuhan pencatatan mutasi barang Milik Daerah	100 %	70,100,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Persentase keterpenuhan pencatatan mutasi barang Milik Daerah	100 %	70,100,000	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah Jumlah Informasi yang relevan, transparan dan akuntabel terkait Barang Milik Daerah	100 %	104,520,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah Jumlah Informasi yang relevan, transparan dan akuntabel terkait Barang Milik Daerah	100 %	104,520,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1,040,947,743	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1,040,947,743
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					1,040,947,743	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					1,040,947,743
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peraturan Perundang-Undangan Persentase ketersediaan Regulasi tentang Pajak Daerah	100 %	309,102,743	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peraturan Perundang-Undangan Persentase ketersediaan Regulasi tentang Pajak Daerah	100 %	309,102,743	
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	100 %	69,875,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	100 %	69,875,000	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Laki-Laki Jumlah Peserta Perempuan	100 %	23,670,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Laki-Laki Jumlah Peserta Perempuan	100 %	23,670,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	100 %	319,450,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	100 %	319,450,000	
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	304,600,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	304,600,000	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	9,350,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	9,350,000	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase capaian target retribusi daerah	100 %	4,900,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase capaian target retribusi daerah	100 %	4,900,000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	15,418,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	15,418,800	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					16,010,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					16,010,000
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					16,010,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					16,010,000
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	16,010,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	16,010,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				42,943,800					42,943,800	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	9,128,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	9,128,800	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				11,010,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				11,010,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				11,010,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				11,010,000	
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	11,010,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	11,010,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22,173,800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22,173,800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22,173,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22,173,800	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	10,658,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	10,658,800	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				12,510,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				12,510,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12,510,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12,510,000	
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	12,510,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	12,510,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24,043,800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24,043,800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,043,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,043,800	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	12,528,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	12,528,800	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				14,510,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				14,510,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				14,510,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				14,510,000	
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	14,510,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	14,510,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20,813,800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20,813,800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20,813,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20,813,800	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	9,298,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	9,298,800	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				11,510,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				11,510,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				11,510,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				11,510,000	
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	11,510,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	11,510,000	
					32,323,800					32,323,800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,213,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,213,800	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	12,698,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	12,698,800	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				15,010,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				15,010,000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				15,010,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				15,010,000	
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	6 %	15,010,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	6 %	15,010,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20,303,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20,303,800	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	8,788,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	8,788,800	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					10,510,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					10,510,000
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					10,510,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					10,510,000
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	10,510,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	10,510,000	
					30,813,800						30,813,800
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1,515,000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	100 %	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	7,088,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	7,088,800	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9,010,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9,010,000
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					9,010,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					9,010,000



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	9,010,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	9,010,000		
					27,613,800						27,613,800	



2.5 Penelaahan program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam hal ini mengkoordinasikan Pelaksanaan Anggaran dari program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait. Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selain berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga selaku Pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 dalam rangka menciptakan sistem dan prosudur yang ideal dalam pengelolaan keuangan daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.



Berpedoman pada rancangan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng dan mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen rancangan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2021. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen–dokumen perencanaan yang ada renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Usulan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng diperoleh antara lain :

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan
2. Program dan kegiatan selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang Kabupaten

Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2022 merangkum aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran Anggota Dewan yang menuntut peningkatan pembangunan khususnya di daerah Kabupaten Soppeng, dimana peningkatan pembangunan tentunya harus sejalan dan seiring dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak dan retribusi. Sehingga diperlukan adanya sinergitas pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang mampu mendukung peningkatan PAD tersebut. Diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder serta kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wakin pajak dan retribusi daerah dan partisipasi pihak ketiga.



Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah/ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lalabatarilau Kab. Soppeng	Persentase Peningkatan PAD/ Persentase Realisasi Target PAD/ Jumlah Peserta Laki-Laki Jumlah Peserta Perempuan	100% 100% 50 orang	Terkait efektivitas penerapan pajak 10% di Kabupaten Soppeng, penerapannya belum maksimal sehingga perlu diadakan sosialisasi Telah disetujui dan diteruskan pada Renja SKPD (diusulkan oleh Hj.ANDI WAHDA, S.E)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah/ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kaju Bitti. Kab. Soppeng	Persentase Peningkatan PAD/ Persentase Realisasi Target PAD/ Jumlah Peserta Laki-Laki Jumlah Peserta Perempuan	100% 100% 50 orang	Masalah perpajakan (Kenaikan Pajak) Telah disetujui dan diteruskan pada Renja SKPD (diusulkan oleh HAERUDDIN TAHANG,S.E)

Terhadap pemangku kepentingan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng senantiasa melaksanakan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pendapatan asli daerah yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan piranti pendukung pengelolaan keuangan yang memadai sehingga mampu berkontribusi dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berpredikat **Wajar Tanpa Pengecualian** .



B A B III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Keuangan Daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan berbagai manfaat yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu di susun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan di hadapi di bidang keuangan Negara Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dilaksanakan secara bertahap dalam (empat) RPJMN, yaitu : RPJMN pertama Tahun 2004–2009, RPJMN kedua Tahun 2010-2014, RPJMN ketiga Tahun 2015-2020, dan RPJMN keempat Tahun 2020-2024 terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus di jaga melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk mendukung hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng perlu melaksanakan perbaikan terkait pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah, dengan melalui beberapa strategi dan kebijakan yang diarahkan pada :

1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tetap sasaran dan akuntabel.



2. Peningkatan system pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah untuk setiap SKPD.
3. Pengembangan system informasi untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengkajian rencana kebutuhan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan aset daerah yang tetap sasaran dan akuntabel.
5. Peningkatan system pengelolaan administrasi dan pelaporan barang milik daerah untuk setiap SKPD.
6. Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui sosialisasi, regulasi, intensifikasi, ekstensifikasi, optimalisasi, pengawasan dan pengendalian internal serta pengembangan system informasi pendapatan.

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui :

1. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan dan penggunaan barang milik daerah yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam Pengelolaan administrasi dan pelaporan aset daerah.
4. Mewujudkan peningkatan PAD serta pendapatan daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan system informasi pendapatan.

3.2 Tujuan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu Tahun ke depan. Tujuan ini di tetapkan untuk memberikan arah terhadap program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng secara umum. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan strategi adalah Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang melayani dengan baik. Untuk mewujudkan misi tersebut maka tujuan yang dicapai atau yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah Yang transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

3.2.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai /dihasilkan secara nyata. Sasaran merupakan rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun pada Tahun 2022 yang dituangkan dalam rancangan akhir Renja 2022 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah unruk mencapai visi-misi pembangunan daerah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi

Kebutuhan dana/pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng hanya bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng. Seperti yang dijelaskan pada Bab II, terhadap program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Akhir BADAN



PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. Tetapi terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD yang disebabkan oleh :

1. Penyesuaian dengan kebijakan kabupaten
2. Penyesuaian dengan hasil evaluasi Tahun 2020
3. Analisa Kebutuhan Operasional
4. Proyeksi Pemetaan Permendagri 90 Tahun 2020

Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten soppeng pada Tahun 2022 secara umum terdiri dari 4 Program 15 Kegiatan, dimana Program dan Kegiatan tersebut akan terbagi pula pada 8 Unit Pelayanan Teknis Badan. Secara spesifik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DAN Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

- e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- f. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- g. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

- h. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan :

- i. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan :

- j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- l. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- m. Penyediaan Bahan/Material
- n. Fasilitas Kunjungan Tamu
- o. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- p. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- q. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

- r. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- s. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- t. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- u. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- v. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- w. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPASKPD
- g. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan penyusunan dan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD



- i. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran

Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah

Kegiatan :

- j. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- k. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
- l. Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitorin dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
- m. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan(PFK)
- n. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
- o. Pembinaan penata usahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- p. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- q. Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan LO dan beban
- r. Koordibasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan triwulanan dan semesteran
- s. Konsolidasi laporan keuangan SKPD BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
- t. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
- u. Koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan pembendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
- v. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah
- w. Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota

Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan :

- x. Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
- y. Pengelolaan dana darurat dan mendesak



- z. Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota

3. PEROGAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan barang milik daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan standar harga
- b. Pengamanan barang milik daerah
- c. Penilaian barang milik daerah
- d. Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara
- e. Penyusunan laporan barang milik daerah

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

Kegiatan :

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
- c. Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
- d. Penagihan pajak daerah
- e. Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- f. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi umum perangkat daerah UPTD Kec. Lalabata

Kegiatan :

- a. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah UPTD Kec.Lalabata

Kegiatan :

- c. Penagihan pajak daerah

7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi umum perangkat daerah UPTD Kec. Donri-Donri

Kegiatan :

- a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD



8. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah UPTD Kec.Donri-Donri

Kegiatan :

- a. Penagihan pajak daerah

9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi umum perangkat daerah UPTD Kec.Liliriaja

- a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

10. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah UPTD Kec.Liliriaja

Kegiatan :

- a. Penagihan pajak daerah

11. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PERANGKAT DAERAH

Administrasi umum perangkat daerah UPTD Kec.Lilirilau

Kegiatan :

- a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

12. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah UPTD Kec. Lilirilau

Kegiatan :

- a. Penagihan pajak daerah

13. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi umum perangkat daerah UPTD Kec.Marioriawa

Kegiatan :

- a. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

14. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah UPTD Kec.Marioriawa

Kegiatan :

- a. Penagihan pajak daerah

15. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



Administrasi umum perangkat daerah UPTD Kec.Marioriwawo

Kegiatan :

- a. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

16. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan perangkat daerah Kec.Marioriwawo

Kegiatan :

- a. Penagihan pajak daerah

17. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi umum perangkat daerah UPTD Kecamatan Ganra

Kegiatan :

- a. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

18. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah UPTD Kec.Ganra

Kegiatan :

- a. Penagihan pajak daerah

19. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi umum perangkat daerah Kec.Citta

Kegiatan :

- a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- b. Penyediaan bahan/material
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

20. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah UPTD Kec.Citta

Kegiatan :

- a. Penagihan pajak daerah

Adapun beberapa unsur dan faktor yang menjadi bahan pertimbangan dirumuskannya Program dan Kegiatan tersebut, khususnya pada sub kegiatan yang bersifat wajib pada Rencana Kerja Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah yakni meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif dan Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah;



2. Pendayagunaan potensi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaannya;
3. Peningkatan pemanfaatan sumber dana khususnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
4. Memaksimalkan potensi desa melalui dukungan dana transfer berupa Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi



Tabel. 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N + 1)	
			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	02			KEUANGAN			149,264,438,671			151,669,614,621
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		25,794,746,330			28,199,922,280
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat		50,130,000			50,130,000
5	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	7,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 % 7,795,000
5	02	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun (dok)	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	14,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 % 14,705,000
5	02	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun (dok)	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	15,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 % 15,830,000
5	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	11 Dokumen	11,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 % 11,800,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi		17,144,422,145				19,549,598,095
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	107 ASN	17,012,659,145	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	19,417,835,095
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SPM yang Terverifikasi (SPM)	1200 SPM	118,340,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	118,340,000
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Tersusun (Dokumen)	3 Dokumen	13,423,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	13,423,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41,050,000				41,050,000
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun (dok)	7 Dokumen	41,050,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	41,050,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		933,341,170				933,341,170
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	15,523,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	15,523,500
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor (Paket)	3 Paket	143,565,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	143,565,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	52000 Lemb	312,532,500	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	312,532,500



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	3 Jenis	168,764,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	168,764,970
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Tamu yg Terfasilitasi (Orang)	600 Orang	20,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	20,425,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	280 kali	272,530,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	272,530,200
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah		357,530,000				357,530,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Unit)	174 unit	337,530,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	337,530,000
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 Paket	20,000,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	20,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		7,070,053,965				7,070,053,965
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Pengiriman (kali)	80 kali	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	10,000,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Air, dan Listrik (kali)	36 kali	6,540,253,965	Pajak Penerangan Jalan		100 %	6,540,253,965
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum (Jenis)	2 Jenis	519,800,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	519,800,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik (%)	100%	198,219,050				198,219,050
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Terbayarkan STNK (unit)	294 unit	157,444,050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	157,444,050
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Baik (unit)	39 unit	19,050,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	19,050,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Luas Gedung Kantor yang Dipelihara (meter persegi)	3 Unit	21,725,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	21,725,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				121,722,364,598				121,722,364,598
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi		1,177,605,000				1,177,605,000
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	1 Dokumen	24,050,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	24,050,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	1 Dokumen	38,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	38,900,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	34 Dokumen	36,225,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 %	36,225,000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	34 Dokumen	43,225,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	43,225,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	34 Dokumen	5,775,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5,775,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	34 Dokumen	5,950,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5,950,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	2 Rancangan	524,525,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	524,525,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup Perubahan APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	2 Rancangan	480,050,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	480,050,000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan	1 Dokumen	18,905,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	18,905,000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100%	128,654,500				128,654,500
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Kas Daerah Persentase ketersediaan dana transaksi harian daerah	4 Dokumen	16,783,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	16,783,000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen SPD yang Diterbitkan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah	2 Dokumen	16,860,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	16,860,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	9 SKPD	14,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	14,200,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N + 1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses	6 Laporan	23,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	23,290,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	6 Berita Acara	25,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	25,355,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Pengujian dan Penyelesaian Verifikasi SP2D yang Terproses Tepat Waktu	100%	32,166,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	32,166,500
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi		356,130,000				356,130,000
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel	2 Laporan	34,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	34,750,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	34 Dokumen	45,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	45,950,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	612 Dokumen	30,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	30,765,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	1 Dokumen	85,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	85,900,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	2 Dokumen	64,450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	64,450,000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	4 Kali	55,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	55,070,000
							Persentase Penyelesaian kerugian daerah	100&					
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	100 % 1 Sisdur	39,245,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	39,245,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	100%	120,059,975,098				120,059,975,098
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengalokasian TKDD dan DD yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100%	112,463,982,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	112,463,982,700
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengalokasian dan pemenuhan kebutuhan dana tanggap darurat dan mendesak	100%	5,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	5,000,000,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tepat waktu dan Tepat Jumlah	100%	2,595,992,398	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 %	2,595,992,398
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Tertib Asset Manajemen		706,380,000				706,380,000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi		706,380,000				706,380,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan	2 Dokumen	107,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	107,000,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	4 dokumen	36,425,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	36,425,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Pemda dan Titik Penjagaan	50 Aset Pemda 2 titik penjagaan	352,195,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	352,195,000
							Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	100%					
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya	2 Dokumen	36,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	36,140,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi	4 Dokumen	70,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	70,100,000
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah Jumlah Informasi yang relevan, transparan dan akuntabel terkait Barang Milik Daerah	5 Informasi/ Dokumen	104,520,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	104,520,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1,040,947,743				1,040,947,743
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		1,040,947,743				1,040,947,743
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	8 Kecamatan	309,102,743	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	309,102,743
							Potensi Pajak Daerah	21.4 M					
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan	1 Kecamatan	69,875,000	Pajak Restoran		100 %	69,875,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta yang Terafirmasi Patuh dan Taat Pajak	50 Orang Laki-Laki 50 Orang Perempuan.	23,670,000	Pajak Hotel		100 %	23,670,000
							Jumlah Wajib Pajak yang sadar Pajak	190000					
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi	2 Dokumen	319,450,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	319,450,000
							Jumlah Jenis Obyek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan	9 Jenis					
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	203200	304,600,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	304,600,000
							Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	165000					
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen	9,350,000	Pajak Penerangan Jalan		100 %	9,350,000
							Jumlah Wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	8 Kecamatan					
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase capaian target retribusi daerah	100 %	4,900,000	Retribusi Jasa Usaha		100 %	4,900,000
TO									149,264,438,671				151,669,614,621
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	69 kali	15,418,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	15,418,800



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16,010,000				16,010,000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		16,010,000				16,010,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kelurahan	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	203200	16,010,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	16,010,000
							Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	165000					
TOTAL									42,943,800				42,943,800
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	30 kali	9,128,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	9,128,800
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11,010,000				11,010,000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		11,010,000				11,010,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kelurahan	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	203200	11,010,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	11,010,000
							Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	165000					
TO									31,653,800				31,653,800
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22,173,800				22,173,800
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				22,173,800				22,173,800



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	30 kali	10,658,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,658,800
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12,510,000				12,510,000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		12,510,000				12,510,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kelurahan	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	203200	12,510,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	12,510,000
							Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	165000					
TO									34,683,800				34,683,800
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Penunjang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan		24,043,800				24,043,800
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		24,043,800				24,043,800
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	49 kali	12,528,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	12,528,800
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14,510,000				14,510,000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		14,510,000				14,510,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kelurahan	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	203200	14,510,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	14,510,000
							Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	165000					
TOTAL									38,553,800				38,553,800
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Penunjang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan		20,813,800				20,813,800
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		20,813,800				20,813,800
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	30 kali	9,298,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	9,298,800
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11,510,000				11,510,000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		11,510,000				11,510,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	11,510,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	11,510,000
TOTAL									32,323,800				32,323,800



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		24,213,800				24,213,800
5	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 kali	12,698,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	12,698,800
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15,010,000				15,010,000
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		15,010,000				15,010,000
5	02	04	2.01	11 Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	15,010,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		6 %	15,010,000
TOTAL								39,223,800				39,223,800
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)		20,303,800				20,303,800
5	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 kali	8,788,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	8,788,800
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10,510,000				10,510,000
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		10,510,000				10,510,000
5	02	04	2.01	11 Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	10,510,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	10,510,000
TOTAL								30,813,800				30,813,800



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N +1)	
							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	2 Jenis	1,515,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	1,515,000
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	10,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 kali	7,088,800	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		100 %	7,088,800
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9,010,000				9,010,000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		9,010,000				9,010,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	100 %	9,010,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		100 %	9,010,000
TOTAL									27,613,800				27,613,800

BAB IV

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja;

Persentase Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja;

Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu, Persentase Keterpenuhan SPJ Tepat Waktu, Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator kinerja;

Persentase Tertib Asset Manajemen

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator kinerja;

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

4.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meliputi Bidang – Bidang di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Lingkup SKPD dan Kecamatan Lalabata.

4.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan yaitu pada Lingkup Kabupaten Soppeng dan 8 Kecamatan, serta dalam dan luar daerah Kabupaten Soppeng

4.4 Kebutuhan Dana Indikatif

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan



alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program.

4.5 Sumber Dana

Sumber dana berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rincian kebutuhan dana indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

B A B V

PENUTUP

5.1 Catatan yang perlu mendapat perhatian

Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2022. Karena Rancangan Akhir Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Ancangan awal Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rancangan Akhir Renja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Rancangan Akhir Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2022. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian.
2. Seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan program – program dan kegiatan – kegiatan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir renja tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan menengah daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja pemerintah daerah.
4. Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pemerintah daerah dan seluruh organisasi satuan perangkat daerah kabupaten soppeng juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta yang telah dicapai kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintahan daerah khususnya, serta masyarakat kabupaten soppeng pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta



seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami semoga Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat dilaksanakan dengan baik di sertai kerja sama dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan **good governance** dan **public service** yang lebih baik.

Demikian Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, Agustus 2021

Mengetahui

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng,

Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680102 199603 1 005